



Walikota dan Buku

SEJAK terpilih sebagai Walikota Yogyakarta, ada tiga prinsip utama yang saya pegang sebagai pedoman pengambilan keputusan dalam kebijakan publik saya, yakni hakekat kekuasaan, etika komunikasi politik, dan dimensi keadilan. Ketiga hal itu dapat saya sebut sebagai prinsip etika kepemimpinan. -- Herry Zudianto (Walikota Yogyakarta) dalam buku karyanya *Kekuasaan Sebagai Wakaf Politik - Manajemen Yogyakarta Kota Multikultur*, Penerbit KANISIUS bekerjasama dengan Impulse Yogyakarta, 2008.

WALIKOTA dan buku adalah dua hal berbeda, namun dapat berhubungan. Seorang walikota atau pejabat publik idealnya adalah pembaca buku yang baik. Buku yang dibaca diharapkan dapat mengembangkan diri sebagai insan pribadi, kepala keluarga, bapak dan pengayom masyarakat setempat, maupun warga masyarakat global. Keberhasilan dari upaya pengembangan diri itu akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang dipimpin.

Buku adalah karya intelektual yang dapat diciptakan oleh siapa saja yang ingin bertumbuh dan sekaligus berbagi kepada sesama. Namun bila se-

orang intelektual belum menulis buku, bukan berarti yang bersangkutan tidak intelek. Akan halnya seorang walikota yang menulis buku, jelas layak dimasukkan di jajaran (pejabat) intelek. Kalau walikotanya intelek, rakyatnya juga (menuju) intelek.

Tradisi intelektual di bidang kepenulisan buku, khususnya di Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, sebenarnya bukan hal yang baru dan tidak mengagetkan. Karena banyak (komunitas) pembaca buku, peresensi buku, penulis buku, penerbit buku, pameran buku, lomba resensi buku, hingga kegiatan penobatan raja dan ratu buku ada di kota ini. Meski demikian, bila seorang walikota di tengah-tengah kesibukannya masih bersedia menulis buku, kiranya patut diapresiasi dan syukur jadi tradisi bagi pejabat publik lainnya.

Berpendapat, berkomunikasi, dan menyampaikan kebijakan publik melalui buku -- selain melalui pengarah resmi di kantor atau forum lain, dialog publik, sosialisasi informasi di media publik, dan sebagainya -- merupakan cara yang *smart*, inspiratif, reflektif, dan sekaligus monumental.

Ada pepatah yang mengatakan, "segala sesuatu akan musnah kecuali perkataan tertulis". Maka berkumu-

OLEH : Y.B. MARGANTORO



nikasi atau menyampaikan aspirasi dan kebijakan publik secara tertulis di media massa dan media buku akan menjadi karya monumental. Karya ini kapan saja di masa mendatang dapat ditengok kembali, dirujuk, dikaji atau dikritisi secara intelek juga.

Kehadiran buku bertajuk *Kekuasaan Sebagai Wakaf Politik - Manajemen Yogyakarta Kota Multikultur* (Penerbit KANISIUS dan Impulse, 2008) karya Walikota Yogyakarta Herry Zudianto ini seolah (baru sekarang) ada jawaban, gambaran atau rumusan yang cukup jelas atas kepemimpinan seorang walikota di kota "Indonesia (dunia) Mini" bernama Yogyakarta. Pernyataan ini tentu tidak dimaksud mengecilkkan peranan para walikota sebelumnya. Tentu bukan tidak mungkin, dan semestinya kita harapkan, walikota berikut memiliki kemampuan lebih baik untuk memimpin Yogyakarta yang semakin tua dan bertambah permasalahan.

Didahului pengantar oleh penulis berupa puisi *Satu Abad Kebangkitan Nasional*, buku ini dibagi enam bab dan disertai epilog. Bab-bab itu adalah Pengantar dari kota gudeg menuju "salad bowl"; Menjadi kota multikultur dan "city of tolerance"; Visi Yogyakarta kota multikultur; Manajemen kota multikultur; dan Kesimpulan. Sedangkan epilog bertajuk *Pluralisme sebagai Jantung Multikulturalisme* karya Robert B. Baowollo.

Dimiliki semua pihak

Tentang etika kepemimpinan, Herry Zudianto menjelaskan dalam beberapa prinsip. *Pertama* adalah masalah definisi dan hakikat kekuasaan. Begitu dia terpilih dan dilantik menjadi Walikota Yogyakarta maka sejak saat itu dia harus memastikan bahwa dia harus benar-benar merasa memiliki, dimiliki dan dihormati oleh semua pihak. Dia ingin agar masyarakat dari semua komponen politik dan semua strata sosial merasa memiliki dia. Mereka harus bisa merasa bahwa dia adalah bagian dari mereka.

Prinsip *kedua* menyangkut etika komunikasi politik. Sebagai pemimpin dia berusaha untuk tidak bersikap sombong. Kemampuan mendengar dia harus maksimal. Dia harus belajar mendengar berbagai pendapat dari banyak pihak. Artinya, setiap kepu-

tusan yang diambil selalu didahului oleh upaya menyerap aspirasi dari banyak pihak.

Prinsip *ketiga* menyangkut dimensi keadilan. Dia menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada satu keputusan pun yang sempurna dan bahwa keputusan yang dia ambil tidak mungkin dapat dan harus memuaskan semua pihak. Apalagi kalau berbicara tentang "adil". Adalah sangat sulit untuk merumuskan makna dan kriteria sebuah keputusan yang adil. Oleh karenanya, dia selalu terlebih dulu mendengar berbagai aspirasi, pendapat dan kepentingan dari berbagai pihak untuk

mengeliminasi kemungkinan terjadi keputusan yang tidak adil.

Penting dan mendesak

Pembicaraan mengenai multikulturalisme Kota Yogyakarta menurut Herry Zudianto menjadi penting dan mendesak karena tiga alasan. *Pertama*, dewasa ini secara nasional muncul gejala melemahnya semangat kebangsaan yang menjadi komitmen kebersamaan kita sebagai satu bangsa dalam satu bingkai *nation-state*. Menguatnya semangat kedaerahan dan politik sektarian untuk tujuan-tujuan politik pragmatis dan kepentingan jangka pendek semakin memprihatinkan.

Kedua, masa egoisme kelompok, baik itu kelompok etnis/suku maupun kelompok agama dan politik, semakin hari semakin menunjukkan perilaku yang menyimpang dari tatakrama demokrasi.

Ketiga, ada banyak kota di Indonesia memiliki kadar heterogenitas penduduk yang relatif sama seperti Kota Yogyakarta. Namun berbeda dengan kota-kota tersebut, kemajemukan Kota Yogyakarta tidak sampai memicu konflik antarkelompok dalam skala besar dan terbuka, baik konflik etnis maupun konflik agama sebagaimana banyak terjadi di kota-kota lain.

Sejak dua tahun lalu dia menaungkan program pengenalan multikulturalisme, khususnya pengenalan antarsuku di Indonesia. Di sana ada keyakinan dasar bahwa sikap menghargai kemajemukan dan perbedaan hanya mungkin terbentuk kalau ada komunikasi antara suku-suku itu sendiri.

Dalam program itu orang-orang

dari berbagai latar belakang kultur yang berbeda diberi kesempatan untuk mengalami *perjumpaan dengan orang lain* dari kultur yang lain dalam suasana kebersamaan yang autentik, tidak direkayasa dan berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu, bisa panjang bisa pendek.

Lalu apa roh multikulturalisme dan toleransi Kota Gudeg? Roh itu adalah *teposeliro*, Orang Jawa mengatakan *Ngono yo ngono neng ajo ngono*. Filosofi ini menyangkut persoalan-persoalan dalam hubungan sosial. Di sana ada prinsip harmoni dan keseimbangan—sebuah filosofi kebudayaan yang bersifat terbuka yang memungkinkan terjadinya proses akulturasi dengan budaya lain.

Wacana keistimewaan

Herry Zudianto juga menyinggung soal rami-rami wacana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Persoalannya menitik pada sebuah pertanyaan sentral: apakah Sri Sultan Hamengku Buwono X perlu dipilih menurut prinsip dan prosedur demokrasi pada umumnya atau karena alasan keistimewaan itu maka Sultan cukup ditetapkan menjadi Gubernur DIY melalui mekanisme pemilihan.

Menurut dia, diskusi semacam itu terlalu sempit, bahkan menyempitkan makna historis peran Yogyakarta dalam membangun wawasan kebangsaan Indonesia ke depan. Keistimewaan kota ini semestinya antara lain terlihat pada pemerintahannya yang bersih dari korupsi dan tidak ada penyelewengan, akuntabel, efektif, efisien, responsif, keberpihakan, transparan dan memiliki visi yang jelas. Sedangkan masyarakatnya juga bagus, peduli pada lingkungan alam kehidupan, berwawasan lingkungan, dan bisa menjadi contoh bagaimana sebuah masyarakat merawat dan menjadikan kotanya hijau, indah, nyaman dan sejuk.

Melalui bukunya ini Herry Zudianto bukan hanya berwacana berdasar teori saja, namun juga melalui pengalaman yang autentik sejak sebelum maupun selama menjadi pejabat publik. Kekuasaannya sebagai wakaf politik tentunya juga terbuka untuk dikritisi dalam perjalanan waktu kini dan mendatang.

Katakan (pendapat dan pengalamannya) dengan buku. Walikota Yogyakarta sudah melakukannya. ***

Y.B. Margantoro, *Wartawan Harian Bernas Jogja dan Direktur Lembaga Pelatihan Jurnalistik Bernas.*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005